Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Sebagai Pilar Pendukung Pariwisata

by I Ketut Satriawan

FILE	MAKALAH_SEMNAS_09102015_SATRIAWAN_REV.DOC (104.5K)		
TIME SUBMITTED	12-FEB-2016 11:28AM	WORD COUNT	3343
SUBMISSION ID	631066244	CHARACTER COUNT	23449

Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Sebagai Pilar Pendukung Pariwisata

Oleh: I Ketut Satriawan

Disampaikan pada Seminar Nasional Sinergitas Sektor Pertanian dan Pariwisata, Tema "Promosi Agrowisata: Merajut Sinergi dan Menjaga Keberlanjutan". Jumat, 9 Oktober 2015, di Ruang Nusantara, Gedung Agrokompleks, Kampus Universitas Udayana, Denpasar.

Pendahuluan

Penduduk Bali berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010) telah mencapai 3.890,8 ribu jiwa, dan diproyeksikan menjadi 4.056,3 ribu jiwa pada tahun 2013. Jumlah penduduk hasil SP2010 meningkat 23,63% jika dibandingkan dengan hasil SP2000 (BPS Propinsi Bali, 2014). Pertumbuhan penduduk berkaitan dengan peningkatan angkatan kerja, yang menjadi salah satu faktor positif untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam jumlah tenaga kerja yang besar akan terdapat jumlah tenaga kerja produktif lebih banyak, dan peningkatan jumlah penduduk secara keseluruhan menjadi potensi pasar domestik yang lebih besar. Hal ini bisa terjadi apabila tenaga kerja produktif dapat terserap pada kesempatan kerja yang tersedia, namun sebaliknya akan tercipta pengangguran jika pertumbuhan tenaga kerja produktif lebih besar daripada pertumbuhan kesempatan kerja (Todaro, 2000).

Menurut lapangan usaha, empat lapangan pekerjaan dominan yang menjadi tempat bekerja penduduk Bali adalah pada lapangan pekerjaan: (1) perdagangan, hotel, restoran, (2) pertanian, (3) jasa, dan (4) industri pengolahan (Tabel 1). Perubahan jumlah orang yang bekerja pada sektor perdagangan, hotel, restoran sangat signifikan mengalami peningkatan selama kurun waktu 2009-2014, yaitu sebesar 139.609 orang. Sebaliknya, pada lapangan pekerjaan pertanian mengalami penurunan yang sangat tajam, yaitu sebesar 158.455 orang

Tabel 1. Perubahan jumlah orang bekerja menurut lapangan pekerjaan

No	Lapangan Pekerjaan	Tahun 2009	Tahun 2013	Perubahan
1	Pertanian	704.282	545.827	-158.455
2	Pertambangan	8.156	9.066	910
3	Industri Pengolahan	293.853	320.555	26.702
4	Listrik, Gas, Air	6.838	9.155	2.317
5	Bangunan	142.370	211.093	68.723
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	488.976	628.585	139.609
7	Angkutan & Telekomunikasi	85.991	72.764	-13.227
8	Keuangan	46.185	93.368	47.183
9	Jasa-jasa	280.467	383.484	103.017

Sumber: BPS Prov. Bali, 2010 dan 2014

Struktur perekonomian Bali mengalami pergeseran dari sektor primer ke sektor tersier dengan berkembangnya pariwisata. Kontribusi sektor perdagangan, hotel, restoran yang terkait dengan pariwisata dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, sektor perdagangan, hotel, restoran menyumbangkan 29,64% terhadap PDRB Bali menjadi 29,89 %

pada tahun 2013. Sebaliknya, sektor pertanian kontribusinya selalu mengalami penurunan, pada tahun 2009 berkontribusi sebesar 18,79% menjadi 16,82% pada tahun 2013.

Pengembangan ekonomi daerah seyogyanya bertumpu pada sumberdaya lokal yang dimiliki dan aktivitas ekonomi yang mampu melibatkan dan menghidupi sebagian besar penduduk. Pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif potensi daerah diharapkan dapat menjamin keberlanjutan sumber penghasil dana pembangunan dan meningkatkan kinerja perekonomian daerah (Eriyatno, 1999; Huseini, 1999).

Provinsi Bali memiliki keunggulan komparatif dibidang pariwisata dalam bentuk keunikan dan keunggulan budaya serta keindahan alam. Selain itu, Provinsi Bali juga mempunyai sistem pertanian dan tata perdesaan yang khas dan unik. Keberadaan dan berperannya lembaga tradisional seperti subak, sangat membantu keberhasilan pembangunan pertanian. Lahan pertanian disamping berfungsi sebagai lahan penghasil komoditi pertanian, juga merupakan modal yang sangat berharga dalam pengembangan kepariwisataan (Satriawan, 2005).

Mengingat struktur perekonomian provinsi Bali disusun oleh tiga sektor utama yaitu sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan sektor pariwisata dengan karakter kebudayaan Bali, serta pembangunan sektor industri kecil, menengah dan koperasi yang menunjang kedua sektor sebelumnya maka diperlukan pemberdayaan masyarakat petani yang dapat mendukung sektor pariwisata sehingga terjadi dampak timbal balik diantara sektor-sektor tersebut. Selain itu, jumlah tenaga kerja sektor pertanian yang melimpah namun produktivitasnya yang belum optimal memerlukan sinergi dengan bidang pariwisata sehingga dapat meningkatkan output dan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Kebijakan pembangunan sektor pertanian harus berjalan seiring dengan kebijakan pembangunan sektor industri karena terdapat penumpukan tenaga kerja di sektor pertanian namun produktivitas di sektor ini rendah. Pengembangan industri yang sesuai oleh karena adalah industri berbasis pertanian dalam arti luas (agroindustri) yang didukung oleh rantai perdagangan (agrobisnis) (Anonim, 2014). Kebijaksanaan pengembangan agroindustri saling tidak mempunyai dua simpul utama. Pertama, agroindustri diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di wilayah produksi pertanian; dan kedua, mampu mendorong pertumbuhan suplai hasil-hasil pertanian untuk kebutuhan agroindustri (Yusdja dan Iqbal 2002). Pengembangan agroindustri, sekaligus mendorong peningkatan budidaya dan kegiatan lain dalam sistem agribisnis secara keseluruhan sehingga pengembangan agroindustri dapat dikatakan sebagai pemacu pertumbuhan pertanian dan perekonomian.

Sektor Pariwisata Bali

Struktur perekonomian Provinsi Bali disusun berdasarkan keunggulan komparatif dan karakteristik daerah. Tiga sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah Bali, yaitu sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan sektor pariwisata dengan karakter kebudayaan Bali, serta pembangunan sektor industri kecil, menengah dan koperasi. Ketiga sektor tersebut diharapkan dapat berkembang secara serasi, seimbang, dan berinteraksi saling menunjang untuk berkontribusi terhadap PDRB Bali. Kenyataannya, perkembangan pariwisata berkembang relatif pesat dibandingkan sektor lainnya sehingga menimbulkan berbagai ketimpangan, seperti ketimpangan pendapatan antar sektor (primer, sekunder, dan tersier), ketimpangan pendapatan antar pelaku (pertanian dan pariwisata), ketimpangan insfrastruktur, dan lainnya. Pelaku pariwisata umumnya mampu mendapatkan pendapatan tinggi, sementara masyarakat yang berkecimpung di sektor primer pendapatannya sangat rendah.

Struktur perekonomian Bali mengalami tingkat kesenjangan berkategori sedang, menunjukkan perekonomian di kabupaten/ kota di provinsi ini belum merata. Penyebab kesenjangan ekonomi tersebut apabila dikaitkan dengan struktur perekonomian adalah persebaran yang tidak merata dari titik-titik destinasi pariwisata sehingga terdapat ketimpangan dalam menikmati benefit ekonomi dari aktivitas pariwisata. Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Bali cukup tinggi, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah. Kesenjangan yang ditimbulkan juga relatif besar antarwilayah yang memiliki sektor pariwisata dengan yang tidak, terutama untuk wilayah Badung dan Denpasar dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Mayoritas sektor pariwisata menyebabkan pertumbuhan ekonomi Badung lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya sehingga seringkali terjadi adanya alih fungsi lahan pertanian. Sektor pariwisata di Provinsi Bali terkonsentrasi di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Gianyar sehingga berpengaruh terhadap tingginya pendapatan perkapita di ketiga daerah tersebut. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Bali menciptakan dampak langsung terhadap sektor perdagangan, hotel, dan restauran sehingga meningkatkan PDRB wilayah. Secara struktural pertumbuhan sektor tersier di Bali lebih tinggi daripada sektor primer dan sekunder (Anonim, 2014).

Secara umum, pendapatan dan infrastruktur akan lebih baik pada wilayah yang perkembangan pariwisatanya lebih maju. Pengintegrasian sektor pertanian (agroindustri) dan pariwisata dalam perencanaan pembangunan ekonomi wilayah melalui pengembangan kawasan wisata agroindustri bagi daerah-daerah yang belum berkembang dapat dilakukan sebagai salah satu alternatif (Satriawan, 2005). Agrowisata sudah banyak bermunculan dan mulai tersebar di kabupaten/kota di Bali. Keberadaan destinasi agrowisata secara kuantitas cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pengembangan agrowisata diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kelestarian ekologi, revitalisasi budaya, dan peningkatan ekonomi secara lebih merata dan berkelanjutan. Songkhla and Somboonsuke (2013) juga menyatakan bahwa kegiatan agrowisata telah mendorong peningkatan konservasi sumber daya pertanian, nilai tambah sumber daya pertanian lokal, dan pengembangan teknologi pertanian. Agrowisata juga ditujukan untuk membangun hubungan yang harmonis antara pelaku pariwisata dan masyarakat lokal (petani) yang bermukim di kawasan perdesaan Bali (Pranadji dan Suhaeti, 2012). Agrowisata merupakan bentuk pariwisata selektif (Brščić, 2006), dan orang yang tertarik dalam agrowisata juga sangat termotivasi untuk mengeksplorasi budaya lokal dan ekowisata (Catalino and Lizardo, 2004).

Kondisi Pertanian Bali

Sektor pertanian masih menjadi penopang pembangunan Provinsi Bali walaupun kontribusinya terhadap PDRB, jumlah tenaga kerja yang terlibat, dan luas areal lahannya semakin menurun. Diantara ketiga permasalahan tersebut, penurunan luas lahan atau alih fungsi lahan menjadi issu paling sering diwacanakan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi fasilitas akomodasi pariwisata ditengarai menjadi pemicu akibat pesatnya perkembangan sektor pariwisata yang membutuhkan fasilitas sarana dan prasarana. Perkembangan sektor pariwisata berdampak negatif pada sektor pertanian, terkait ketersediaan luas lahan pertanian, walaupun pada beberapa variabel sektor pariwisata memberikan dampak positip. Penurunan luas lahan pertanian (alih fungsi lahan) secara alami pasti terjadi namun seharusnya dapat dihambat dengan berbagai regulasi yang harus diinisiasi/diciptakan oleh pemerintah. Luas lahan sebagai faktor produksi pangan harus dijaga dan dilestarikan sehingga produksinya mencukupi untuk penduduk

untuk mencapai ketahanan pangan (ketersediaan, kualitas, dan distribusi). Apabila ketahanan pangan buruk atau ketersediaannya mayoritas tidak diproduksi sendiri atau lebih tergantung pada wilayah lain (atau ketergantungan tinggi) maka akan sangat rentan menjadi komoditas politik yang akhirnya dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah.

Proteksi terhadap lahan pertanian untuk mengurangi alih fungsi lahan di Bali sangat mendesak harus segera ditindaklanjuti, salah satunya melalui penguatan status lahan abadi sehingga dapat berproduksi secara berkelanjutan. Dampak status ini selanjutnya perlu diikuti dengan berbagai insentif terhadap pemilik lahan, misal terkait pajak, saprodi, akses pasar dan penyerapan terhadap hasil produksi denga harga yang layak, sarana dan prasarana, dll., sehingga pemilik lahan tetap dapat melaksanakan usaha tani yang menguntungkan. Hal ini sangat diperlukan karena penguasaan luas lahan oleh petani sangat terbatas sehingga tidak layak secara ekonomis. Walaupun secara usaha tani menguntungkan, tetapi tidak dapat memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan petani.

Untuk menciptakan kondisi tersebut di atas maka sangat terbuka peluang untuk mensinergikan sektor pertanian dengan sektor pariwisata di Provinsi Bali. Pendapatan sektor pariwisata dapat disumbangkan kembali untuk menjaga dan melestarikan sektor pertanian. Bila sektor pertanian terjaga dan lestari maka budaya pertanian yang juga menjadi daya tarik pariwisata dapat dinikmati sepanjang masa dan menjadi sumber pendapatan bagi sektor pariwisata. Hal ini memang mudah diwacanakan dan secara teoritis sangat mungkin terlaksana, namun diperlukan niat dan usaha yang serius pada semua *stakeholders* yang terlibat karena merupakan suatu implementasi sistem kemitraan yang sangat kompleks. Sistem kemitraan setara (sinergi pertanian – pariwisata) akan berjalan dengan baik apabila setiap aktor yang terlibat dapat memahami dan melaksanakan fungsinya masing-masing dengan baik secara professional serta mendapatkan manfaat secara proporsional sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Pemberdayaan masyarakat petani yang dilaksanakan dengan meningkatkan kapasitas dan partisipasinya pada setiap bentuk aktifitas pertanian dan pariwisata akan meningkatkan loyalitas, sehingga kepemilikan lahan pertanian yang terbatas mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Pariwisata

Wacana mengenai pembangunan berdimensi kerakyatan merupakan reaksi keras terhadap kebijakan pembangunan konglomerasi yang selama ini lebih berpihak pada para pemilik modal (investor). Berbagai potensi kepariwisataan digali, dikembangkan, dan dipromosikan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan hak-hak dan kepentingan masyarakat tuan rumah. Masyarakat sebagai tuan rumah sekaligus pemilik sah atas sumber daya justru kerap mengalami marginalisasi yang ditandai dengan terbatasnya kesempatan mereka untuk berperanserta dalam pembangunan pariwisata, sehingga perkembangan sektor pariwisata tidak mampu memberikan manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan hidup mereka.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, diperlukan model pembangunan yang mengutamakan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam berbagai tahap pembangunan, yang dikenal dengan *community-based resource management* atau *community management* (Korten, 1986). Tiga alasan dasar mengenai mengapa *community management* sangat penting sebagai arahan dasar pembangunan, yaitu:

a) Adanya *local variety* (variasi lokal) yang tidak dapat diberikan perlakuan sama.

b) Adanya *local resources* (sumber daya lokal) yang secara tradisional telah dikelola oleh masyarakat setempat secara turun-temurun.
c) Adanya *local accountability* (tanggung jawab lokal) yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan biasanya lebih bertanggung jawab.

Pembangunan pariwisata berdimensi kerakyatan mengacu kepada pembangunan pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pendekatan ini pada dasarnya juga merupakan model pemberdayaan masyarakat yang memberikan lebih banyak peluang kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Hal ini berarti memberi wewenang atau kekuasaan kepada masyarakat lokal untuk mengerahkan kemampuan mereka sendiri dalam mengelola sumber daya setempat. Kedudukan mereka adalah sebagai pemeran utama dalam membuat keputusan dan melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kehidupannya (Cernea, 1991).

Berpijak dari fenomena tersebut, maka pengelolaan potensi kepariwisataan, semestinya lebih mengedepankan peranserta dan tanggungjawab masyarakat setempat. Beberapa kriteria untuk memberikan arahan tentang pengembangan pariwisata perlu ditetapkan, seperti yang diperkenalkan oleh Rev. Ron O'Grady sebagai berikut:

a) Pembuatan keputusan tentang bentuk pariwisata pada suatu tempat harus dilakukan melalui konsultasi dan dapat diterima masyarakat lokal
b) Masyarakat harus mendapatkan bagian yang layak dari keuntungan yang berasal dari pariwisata
c) Pariwisata harus berdasarkan pada prinsip-prinsip lingkungan dan ekologi yang logis, peka terhadap budaya lokal dan tradisi keagamaan dan seharusnya tidak akan menempatkan anggota masyarakat tuan rumah dalam posisi yang rendah
d) Jumlah wisatawan yang mengunjungi suatu tempat seharusnya tidak akan melebihi populasi lokal dan meniadakan nilai keaslian kemanusiaan yang ada.

Dalam pemberdayaan masyarakat terjadi proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif dan terlibat aktif melaksanakan kegiatan yang dapat memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Masyarakat harus menjadi subyek pembangunan dan bukan hanya sebagai obyek pembangunan. Untuk kasus agrowisata di Provinsi Bali, dalam upaya pemberdayaan masyarakat (petani) dapat dilakukan antara lain (Satriawan, *et. al*., 2015):

a. Menggabungkan lahan beberapa petani di sekitar agrowisata yang telah ada untuk memperluas areal agrowisata dan memperkaya koleksi tanaman di area budidaya. Semakin tinggi diversitas atau keragaman jenis tanaman dalam suatu agrowisata akan menjadi modal yang semakin berharga dalam usaha mendatangkan pengunjung. Persepsi ini menjadi inspirasi bagi hampir setiap pelaku bisnis agrowisata di Bali, sehingga mereka selalu berusaha untuk melengkapi koleksi tanamannya. Namun, disisi lain tidak disadari bahwa tidak semua koleksi tanaman dapat tumbuh di semua lokasi, artinya tanaman itu memerlukan habitat tertentu agar dapat tumbuh secara normal. Oleh karena itu, tidak harus semua agrowisata memiliki jumlah tanaman yang banyak dan sama jenisnya. Justru, penyesuaian atas kondisi tumbuh tanaman pada suatu wilayah akan memberikan ikon ciri spesifik dan keunikan agrowisata dan dapat menjadi keunggulan masing-masing agrowisata. Apabila setiap agrowisata memiliki keunggulannya masing-masing maka kompetisi antar agrowisata tidak menjadi ketat dan bahkan sebaliknya, saling menjadi pelengkap antar agrowisata.

b. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) lokal untuk mendapatkan produk agroindustri beserta hilirisasinya yang dapat diperdagangkan pada area *shopping* agrowisata. Sinergi ini akan menumbuhkan kerjasama dengan penduduk lokal sehingga nilai tambah sektor pertanian akan diperoleh penduduk lokal sekitar agrowisata. Namun saat ini masih berkendala pada sumberdaya manusia (SDM) terampil yang mampu menyediakan produk-produk yang dibutuhkan agrowisata. Saat ini produk-produk tersebut masih dominan dipasok dari luar Bali. Untuk mempercepat dan meningkatkan ketersediaan produk tersebut diperlukan dukungan dari instansi terkait dan pendampingan sehingga UKM lebih cepat tumbuh dan dapat menyediakan produk-produk yang diperlukan agrowisata.
c. Sinergi dan koordinasi antara pemilik agrowisata dengan pihak biro perjalanan dan *tour guide*. Kondisi agrowisata saat ini, secara internal harus menyiapkan segala sumberdaya yang ada (termasuk pelayanannya) untuk menjadikan atraksi wisata yang berkualitas dan layak untuk dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pada sisi eksternal, ada biro perjalanan dan *tour guide* yang sangat berpengaruh pada jumlah kunjungan wisatawan yang diperoleh agrowisata. Sebagian besar kunjungan ke agrowisata masih diarahkan oleh *guide* atau biro perjalanan. Pemandu wisata atau *guide* juga berperan langsung sebagai *interpreter* agrowisata, terutama pada area budidaya. Dalam hal ini, pengetahuan pemandu wisata perlu diseragamkan (standarisasi) sehingga interpretasi yang diberikan kepada wisatawan dapat dilakukan secara benar dan tepat. Sebaiknya, perilaku pemandu wisata jangan hanya mengejar insentif (fee) dari pemilik agrowisata, namun tetap mengusahakan kepuasan wisatawan agar kunjungan bisa berulang dan menjadi promosi sukses untuk kerabat wisatawan lainnya.
d. Kerjasama *tour guide* / operator pariwisata dengan penduduk lokal. *Tour guide* / operator yg membawa wisatawan harus bekerjasama dengan penduduk lokal di lokasi wisata, misalnya untuk menyediakan konsumsi atau perlengkapan yang diperlukan wisatawan agar tidak membawa dari kantor. Hal ini diharapkan agar penduduk di sekitar lokasi wisatawan mendapatkan *multiflier effect* kegiatan pariwisata. Apabila hal ini dapat disepakati maka pada awalnya, penduduk lokal masih perlu dilatih dan didampingi untuk menjamin barang/jasa yang disediakan penduduk lokal sesuai standar yang dipersyaratkan (termasuk sanitasi dan hygiene jika diperlukan produk untuk kebutuhan konsumsi).
e. Pemanfaatan SDM Lokal. Beberapa agrowisata yang sudah maju membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Tenaga kerja yang diperlukan mulai dari penerimaan sampai pemanduaan di areal agrowisata. Umumnya setiap kelompok wisatawan yang berkunjung dipandu oleh seorang pelayan dari area budidaya, pengolahan, *tester* produk, dan *shopping*.
f. Pembentukan asosiasi agrowisata. Asosiasi atau lembaga agrowisata diperlukan sebagai wadah untuk menyuarakan kepentingan atau alamat bagi *stakeholders* yang memerlukan sehingga tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri. Wadah ini juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan agrowisata, seperti promosi bersama, mengatasi perang tarif dan *fee*, serta sebagai wahana untuk *sharing* pengalaman dalam upaya meningkatkan kualitas usaha agrowisata.
g. Penyusunan regulasi agrowisata. Regulasi kebijakan pariwisata terkait dengan pengembangan agrowisata di Provinsi Bali masih sangat terbatas. Kurangnya regulasi tersebut mengakibatkan susahnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan agrowisata, serta hilangnya potensi penerimaan pajak. Apabila ada penyimpangan dalam agrowisata, yang dapat merugikan maka relative sulit dan lambat untuk

dapat direspon, sehingga dapat berimplikasi menurunkan citra pariwisata secara keseluruhan. Regulasi juga diperlukan untuk mengatur investasi agrowisata sehingga tidak terjadi kanibalisme investasi. Misalnya pengaturan lokasi agrowisata yang disesuaikan dengan produk dan iklim sehingga terjadi spesifikasi yang dapat mencirikan keunggulan dan keunikan masing-masing agrowisata. Saat ini terjadi pengembangan agrowisata yang ingin mencari kesamaan dan kelengkapan tanaman tanpa memperhatikan syarat tumbuh tanaman. Hanya sekedar memberikan contoh bahwa agrowisata tersebut sudah lengkap memiliki koleksi tanaman dari produk yang dijualnya.

Tidak seimbangnya pembagian hasil pemanfaatan pertanian untuk kepentingan pariwisata juga memerlukan regulasi. Apabila suatu wilayah/kawasan dijadikan daya tarik wisata maka pemilik/masyarakat di sekitar wilayah tersebut harus mempunyai hak (pendapatan) yang pantas atau bagian dari aktifitas pariwisata tersebut. Perlu diatur, siapa yang harus menginisiasi dalam rangka bagi hasil manfaat pariwisata tersebut sehingga masyarakat di lokasi tersebut tidak mendapatkan sampahnya saja. Hal ini perlu diinisiasi dan difasilitasi oleh pemerintah, karena umumnya pemilik lokasi daya tarik wisata berada pada posisi relatif lemah jika dibandingkan dengan pemilik modal atau yang mendatangkan wisatawan (*tour operator*).

Kesimpulan

Pemberdayaan masyarakat pertanian dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Bali, sangat diperlukan dalam rangka mendukung keberlanjutan pariwisata serta mengoptimalkan nilai tambah produk pertanian untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Peluang untuk mensinergikan sektor pertanian dengan sektor pariwisata di Provinsi Bali sangat terbuka. Sistem kemitraan setara (sinergi pertanian – pariwisata) akan berjalan dengan baik apabila setiap aktor yang terlibat dapat memahami dan melaksanakan fungsinya masing-masing dengan baik secara professional serta mendapatkan manfaat secara proporsional sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat (petani) melalui pengembangan pariwisata (agrowisata) dapat dilakukan melalui: (a) penggabungan lahan beberapa petani, (b) pemberdayaan UKM lokal, (c) sinergi dan koordinasi antara pemilik agrowisata dengan pihak biro perjalanan dan *tour guide*, (d) kerjasama *tour guide* / operator pariwisata dengan penduduk lokal, (e) pemanfaatan SDM lokal, (f) pembentukkan asosiasi agrowisata, dan (g) penyusunan regulasi terkait pengembangan agrowisata. Kesuksesan dalam pemberdayaan masyarakat petani akan menjadi modal yang sangat berharga dalam mendukung pengembangan pariwisata.

Daftar Pustaka

Anonim, 2014. Perkembangan Pembangunan Provinsi Bali 2014. Seri Analisa Pembangunan Daerah. Desember 2014.

BPS Provinsi Bali. 2010. Bali Dalam Angka 2010. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Denpasar.

BPS Provinsi Bali. 2014. Bali Dalam Angka 2014. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Denpasar.

Brščić, K, 2006. The Impact of Agrotourism on Agricultural Production. Journal of Central European Agriculture, 7(3): 559-563.

Catalino, A.H. and M. Lizardo, 2004. Agriculture, Environmental Services and Agro-Tourism in the Dominican Republic. *electronic* Journal of Agricultural and Development Economics (eJADE), 1(1):87-116

Cernea. M.M. 1991. "Unit-unit Alternatif Organisasi Sosial untuk Mendukung Strategi Penghutanan Kembali". *dalam* M.M. Cernea (ed.): Menguatkan Manusia dalam Pembangunan. Basulio Bengo Teko (Penerjemah). Universitas Indonesia, Jakarta.

Eriyatno. 1999. Ekonomi berlandaskan kemampuan sumberdaya lokal (Local Resource-Based Economy). Makalah Lokakarya Pembangunan Bali di Masa Depan. Kerjasama Universitas Udayana, Diparda-Bali, CRC for Sustainable Tourism Australia, Bali Post.

Hulker. N. 2000. "Archaeologi from Below". Public Archaeology, 1(1): 21–23.

Huseini M. 1999. Mencermati Misteri Globalisasi: Menata Ulang Strategi Pemasaran Internasional Indonesia Melalui Pendekatan Resource-Based. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, Jakarta.

Kodhyat H. 1997. Hakekat dan perkembangan wisata alternatif. Di dalam: Gunawan MP. Proseding Seminar dan Lokakarya Perencanaan Pariwisata yang Berkelanjutan; Bandung, 29 Juni 1996. Penerbit ITB, Bandung. Hlm. 74-81.

Korten. D.C. (ed.). 1986. Community Management: Asian Experience and Perspektives. Kumarian Press, Connenticut.

Pranadji, T., R.N. Suhaeti. 2012. Masa Depan Pertanian-Perdesaan di Bali dalam Persepektif Perencanaan Pembangunan Daerah. Analisis Kebijakan Pertanian, 10(3): 225-238.

Satriawan, I K., I B.G. Pujaastawa, I M. Sarjana, 2013. Using of Small Scale Agriculture Land for Agro-Tourism Destination in Bali Province. Proceeding of the 5th Asian Conference on Precision Agriculture (ACPA), June 25-28, 2013, Jeju Korea, 236-243.

Satriawan, I K., I B.G. Pujaastawa, I M. Sarjana. 2015. Development of Small-scale Agro-tourism in the Province of Bali, Indonesia. Paper presented on "2nd International Conference on Aquaculture, Agro Business Industry and Agritourism (iCAAA 2015)", 4-5 September at Krabi, Thailand.

Satriawan, IK. 2005. Rancang Bangun Sistem Penunjang Keputusan Model Integrasi Agroindustri dan Pariwisata Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Jembrana. Disertasi. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Songkhla, T. N. and B. Somboonsuke, 2013. Interactions between agro-tourism and Local Agricultural Resources Management: A Case Study of Agro-tourism Destinations in Chang Klang District, Southern Thailand. Discourse Journal of Agriculture and Food Sciences, 1(3):64-67.

Todaro, M.P. 2000. Economic Development. Seventh Edition. Addison-Wesley Longman, Inc. New York.

Zoto, S., E. Qirici, E. Polena, 2013. Agrotourism - A Sustainable Development for Rural Area of Korea. European Academic Research, 1(2):209-223.

Yusdja Y, Iqbal M. 2002. Kebijaksanaan pembangunan agroindustri. Di dalam : Sudaryanto T, Rusastra IW, Syam A, Ariani M, editor. Analisis Kebijaksanaan : Paradigma Pembangunan dan Kebijaksanaan Pengembangan Agroindustri. Monograph Series No. 22. Bogor : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Balitbang Pertanian, hlm. 199-209.

Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Sebagai Pilar Pendukung Pariwisata

ORIGINALITY REPORT

17%	12%	3%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Udayana University Student Paper	5%
2	www.pps.unud.ac.id Internet Source	3%
3	teknikelectronika.blogspot.com Internet Source	3%
4	Submitted to iGroup Student Paper	2%
5	lppm.unud.ac.id Internet Source	1%
6	www.uncapsa.org Internet Source	1%
7	www.cifor.cgiar.org Internet Source	<1%
8	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1%

9	www.reeis.usda.gov Internet Source	<1%
10	event.bdfish.org Internet Source	<1%
11	www.capri.cgiar.org Internet Source	<1%
12	Submitted to University of East London Student Paper	<1%
13	they-astika.blogspot.com Internet Source	<1%
14	blogkumpulancontohskipsi.blogspot.com Internet Source	<1%
15	regionalinvestment.bkpm.go.id Internet Source	<1%

EXCLUDE QUOTES	OFF	EXCLUDE MATCHES	OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	OFF		